



## EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2015 -2019

Sandelia<sup>1</sup>, Agus Munandar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul  
<sup>1</sup>sand3lia@student.esaunggul.ac.id, <sup>2</sup>agus.munandar@esaunggul.ac.id\*<sup>1</sup>

### Info Artikel :

Diterima : 5 November 2021

Disetujui : 15 November 2021

Dipublikasikan : 29 Desember 2021

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Pemerintah  
Daerah Kota  
Batam, APBD,  
informasi  
keuangan,  
analisa  
keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan, dan juga untuk menganalisa kinerja Pemerintah Kota Batam melalui Laporan Keuangan dari periode 2015 sampai dengan 2019. Dan penilaian kinerja ini akan dilakukan dengan menggunakan analisa rasio keuangan. Hasil dari penelitian memperlihatkan analisa desentralisasi dengan rata-rata 43,92% dan tingkat kemandirian 81,31% maka disimpulkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam sudah baik, namun masih perlu meningkatkan realisasi penerimaan asli daerah (PAD) agar mendorong derajat desentralisasi menjadi lebih baik lagi.

### ABSTRACT

**Keywords:**  
The Batam City  
Government,  
APBD,  
financial  
report,  
financial  
analyse

The research was to fulfilling the assignments, other than that also to analyse performance of The Batam City's Government through Their Financial Reports from period of year 2015 until 2019. Evaluation of their performance will using financial ratio analysing. And the results showed that decentralization analysis in average at 43,92% and for financial autonomy at 81,31%. The research concluded that performance of The Batam City's Government is good. But still need to increase the realization of Regional Original Revenue (PAD) for better result of decentralization degree..

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas daerah. Penerapan desentralisasi didanai dari APBD, serta APBD sebagai refrensi untuk Pemda dalam menjalankan pemerintahan. Keseanggupan Pemda dalam mengatur keuangan daerah tertuang dalam APBD dan menggambarkan kesanggupan Pemda mendanai pengeluaran untuk pemerintahan, pelayanan sosial masyarakat, dan pembangunan daerah (Halim and Kusufi 2017).

Untuk dapat melihat seberapa kesanggupan Pemda diperlukan pengukuran kinerja. Selain itu tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah, membuat keputusan yang tepat, mengalokasikan sumber daya, dan menciptakan akuntabilitas publik (Mardiasmo 2002). Penilaian kinerja dapat dilakukan

dengan melakukan analisa informasi keuangan dan APBD yang sudah ditargetkan dan dilaksanakan. Analisa informasi keuangan bermaksud untuk dapat memahami informasi keuangan, menilai informasi keuangan, dan memakai informasi keuangan dalam pengambilan keputusan (Mahmudi 2010).

Kemandirian Pemda Batam tahun 2006 – 2010 berada dibawah 25%, dengan derajat desentralisasi fiskal antara 10,1% - 20%, dengan kata lain PAD Batam belum dapat membiayai pemerintahan sepenuhnya (Irsutami 2016). Sektor yang menjadi acuan penggerak perekonomian antara lain adalah komunikasi, air dan gas, listrik, industri, perbankan, perdagangan dan jasa, serta komoditas ekspor dari negara lain. Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi diukur oleh Produk Domestik Regional Bruto (GRDP) mengalami peningkatan signifikan mencapai 5,92% dari 4,96% pada tahun 2018 (Justyanita, Sephia Septiana 2021).

Bagaimana kemandirian Pemda Batam untuk tahun 2015 – 2019? Apakah sudah ada peningkatan? Melanjuti penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana hasil evaluasi kinerja Pemda Batam tahun 2015 – 2019.

## **KAJIAN PUSTAKA**

APBD dijelaskan sebagai perencanaan finansial Pemda, satu sisinya menyajikan pengeluaran untuk pembiayaan aktivitas dan proyek daerah, dan satu sisi lainnya menyajikan pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran, hal tersebut diperkuat dengan UU No.32 tahun 2004 (Pemerintah Republik Indonesia 2004). Struktur APBD terdapat 3 bagian antara lain pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah ialah semua hal sebagai penambah nilai kekayaan dalam satu periode, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pendapatan daerah lainnya yang sah. Belanja daerah ialah segala sesuatu yang dapat diakui sebagai pengeluaran dalam satu tahun anggaran, dapat berupa belanja barang, belanja pegawai, subsidi, belanja modal, belanja bagi hasil, bunga, hibah, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Sedangkan pembiayaan merupakan penerimaan yang dibayar kembali dan pengeluaran yang akan kembali diterima pada pada tahun berjalan ataupun pada tahun berikutnya.

Macam-macam penerimaan pembiayaan antara lain sisa lebih pembiayaan periode sebelumnya, dari penjualan kekayaan daerah yang dipisah, pinjaman, pencairan dana cadangan, pengembalian pinjaman. Pengeluaran adalah sebagai berikut pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman, penyerahan modal Pemda, juga investasi nirlaba.

Kinerja keuangan daerah adalah alat ukur untuk mengukur kesanggupan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut (Halim and Kusufi 2017). Agar dapat mencapai pengaturan keuangan daerah yang terpercaya, dan terbuka diperlukan analisa perbandingan finansial terhadap pendapatan belanja daerah. (Mardiasmo 2002)

Mahmudi (2010) berpendapat bahwa analisa yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Pemda yang didasari informasi finansial yang datanya didapat dari APBD antara lain sebagai berikut: 1) Derajat Desentralisasi, hasil dari rasio ini menggambarkan kontribusi PAD kepada total penerimaan daerah, semakin tinggi sumbangsih PAD berarti menandakan kesanggupan pemerintah daerah yang semakin tinggi juga dalam desentralisasi. 2) Analisa Kemandirian, otonomi membuktikan kesanggupan Pemda dalam mendanai kegiatan pemerintahan sendiri. Cara menghitung analisa kemandirian adalah membandingkan antara PAD dengan subsidi dari Pemerintah Pusat ataupun Propinsi serta Pinjaman. 3) Analisa Aktivitas, dalam mengukur analisa aktivitas ini

terdapat 2 komponen yang harus di analisa, antar lain analisa belanja langsung dan analisa belanja tidak langsung. Manfaat dari analisa ini adalah untuk pengendalian anggaran dan biaya (Mahmudi 2010). Yang dimaksud belanja langsung ialah pengeluaran yang terkait langsung dengan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung ialah pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan. Komposisi belanja langsung lebih besar nilainya daripada belanja tidak langsung baru dapat dikatakan ideal, karena pada dasarnya belanja langsung yang akan mempengaruhi hasil dari kegiatan. 4) Analisa Pertumbuhan, digunakan untuk mengukur kesanggupan pemerintah daerah untuk meningkatkan ataupun mempertahankan kinerja disetiap periodenya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam materi ini ialah penelitian kualitatif dengan data yang bersifat deskriptif. Untuk menjabarkan informasi dengan jelas dan terperinci, pengumpulan data yang dihasilkan akan mengacu kepada pentingnya kedalaman dan detail suatu data penelitian.

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi. Untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis dalam bentuk laporan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam diunggah melalui situs resmi BPKAD Kota Batam (<https://bpkad.batam.go.id>).

Tahapan analisa informasi finansial Pemda Kota Batam tahun 2015 – 2019, pertama dengan menghitung derajat desentralisasi, dengan perbandingan PAD dan pendapatan daerah. Kemudian menghitung analisa kemandirian, dihitung dengan membandingkan PAD, bantuan pemerintah pusat / propinsi, dan pinjaman. Hasil dari rasio kemandirian akan menggambarkan kemampuan keuangan Pemda dan juga pola hubungannya. Jika hasil analisa kemandirian diatas 75% - 100%, maka berarti Pemda tersebut memiliki kemampuan keuangan tinggi dengan pola hubungan delegatif, Jika hasilnya 50% - 75%, maka kemampuan keuangannya sedang dengan pola partisipatif, apabila hasil analisa kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan keuangan rendah dan pola hubungan konsultatif, terakhir yang menunjukkan kesanggupan keuangan yang rendah sekali dengan pola hubungan instruktif jika hasil analisa kemandiriannya dibawah 25%. Menghitung analisa aktivitas, dengan cara melakukan 2 analisa yaitu analisa belanja langsung dan belanja tidak langsung, untuk belanja langsung dihitung dengan membandingkan belanja langsung dengan belanja daerah. Sedangkan analisa belanja tidak langsung caranya dengan membandingkan belanja pembangunan dengan belanja daerah. Menghitung analisa pertumbuhan, dibutuhkan 3 analisis yaitu analisa pertumbuhan PAD, analisa pertumbuhan pendapatan, dan analisa pertumbuhan belanja. Untuk menghitung analisa pertumbuhan PAD dengan cara selisih antara realisasi PAD tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya. Menghitung analisa pertumbuhan pendapatan dengan perbandingan selisih antara realisasi pendapatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Dan perhitungan analisa pertumbuhan belanja dengan cara membandingkan selisih antara realisasi belanja tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan realisasi belanja tahun sebelumnya.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### Gambaran Umum Daerah Kota Batam

Kota Batam dengan luas wilayah daratan 715 km<sup>2</sup>, dan total luas keseluruhan wilayah seluas 1.575 km<sup>2</sup>, memiliki iklim tropis dan rata-rata suhu 26 derajat celsius sampai dengan 34 derajat celsius. Kota Batam ini tidak dapat dijadikan sebagai lahan pertanian, karena cuaca yang sering berubah dan memiliki tanah yang kurang subur. Pulau-pulau di area Kota Batam seperti Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, serta pulau-pulau kecil di wilayah Selat Malaka juga Selat Singapura. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Batam per tahun 2019, perkiraan total penduduk Batam sekitar 1,37 juta jiwa. Batam adalah kota paling strategis karena berada di jalur internasional dan juga berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

### Gambaran Umum PDRB Kota Batam

PDRB per kapita Kota Batam untuk tahun 2015 – 2019 dapat dilihat di tabel 1. Data PDRB diambil dari situs resmi bps Kota Batam.

**Tabel 1. PDRB Per Kapita Kota Batam tahun 2015 - 2019**

| Komponen                              | PDRB Per Kapita Kota Batam (dalam Juta) |          |          |          |          |
|---------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
|                                       | 2015                                    | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Atas Dasar Harga Berlaku              | 101,72                                  | 105,59   | 107,13   | 112,70   | 119,53   |
| Atas Dasar Harga Konstan 2010         | 76,14                                   | 77,14    | 75,95    | 76,70    | 79,07    |
| Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 | 2,63                                    | 1,39     | -        | 1,10     | 3,09     |
| Jumlah Penduduk                       | 1.188,00                                | 1.236,00 | 1.283,00 | 1.329,00 | 1.377,00 |
| Pertumbuhan Jumlah Penduduk           | 4,13                                    | 3,99     | 3,78     | 3,59     | 1,02     |

2018 dan 2019 adalah angka sementara

SUMBER: situs resmi BPS KOTA BATAM <https://batamkota.bps.go.id>

### Analisa Kinerja Pemda Kota Batam Tahun Anggaran 2015 – 2019 Pendapatan Daerah

Dari data sumber Laporan Keuangan tahun 2015 – 2019 Kota Batam yang telah diaudit, menunjukkan pos pendapatan daerah nya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Dari grafik pendapatan tergambar adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

**Gambar 1. Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2015 - 2019**



SUMBER: BPKAD KOTA BATAM : LAPORAN KEUANGAN AUDITE 2015 – 2019, DIOLAH KEMBALI

### Analisa Desentralisasi

Analisa ini akan menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Keseluruhan Penerimaan Daerah. Dari tabel hasil analisa desentralisasi Kota Batam dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, memperlihatkan bahwa PAD sudah berkontribusi cukup baik dan stabil dalam keseluruhan pendapatan daerah, dengan rata-rata per tahunnya di angka 43,92%, terendah di tahun 2016 yaitu 40%, dan tertinggi di tahun 2018 yaitu 46% .

**Tabel. 2.1. Analisa Desentralisasi Kota Batam T.A. 2015 - 2019**

| T.A. | PAD               | Pend. Daerah      | %   |
|------|-------------------|-------------------|-----|
| 2015 | 836.713.858.342   | 1.936.406.807.580 | 43% |
| 2016 | 881.268.969.157   | 2.215.680.286.682 | 40% |
| 2017 | 974.124.203.684   | 2.157.662.190.348 | 45% |
| 2018 | 1.084.640.559.853 | 2.360.092.860.080 | 46% |
| 2019 | 1.147.685.950.193 | 2.522.890.256.865 | 45% |

SUMBER : BPKAD KOTA BATAM : LAPORAN KEUANGAN AUDITE 2015 - 2019

**Gambar 2. Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Kota Batam 2015 -2019**



SUMBER : BPKAD KOTA BATAM : LAPORAN KEUANGAN AUDITE 2015 - 2019, DIOLAH KEMBALI

### Analisa Kemandirian

Hasil analisa Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kota Batam tahun 2015 – 2019 menggambarkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Batam yang relatif tinggi. Hasil Analisa KKD ini juga memperkuat hasil analisa Derajat Desentralisasi yang sudah baik. Berdasarkan hasil analisa KKD ini terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kota Batam walaupun belum menunjukkan hasil 100%, tetapi sudah cukup mandiri dengan hasil rata-rata 81,31% dalam 5 tahun (2015 – 2019), yang berarti Pemerintah Daerah Kota Batam dianggap dapat mendanai sendiri kegiatan pemerintahan.

**Tabel. 2.2. Analisa KKD Kota Batam, 2015 - 2019**

| T.A. | Derajat Desentralisasi | Rasio Keamndirian Keuangan Daerah | Kemampuan Keuangan | Pola Hubungan |
|------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 2015 | 43%                    | 76%                               | Tinggi             | Delegatif     |
| 2016 | 40%                    | 66%                               | Sedang             | Partisipatif  |
| 2017 | 45%                    | 82%                               | Tinggi             | Delegatif     |
| 2018 | 46%                    | 92%                               | Tinggi             | Delegatif     |
| 2019 | 45%                    | 90%                               | Tinggi             | Delegatif     |

SUMBER : BPKAD KOTA BATAM, LAPORAN KEUANGAN AUDITE 2015 - 2019, DATA TELAH DIOLAH ULANG

### Analisa Aktivitas

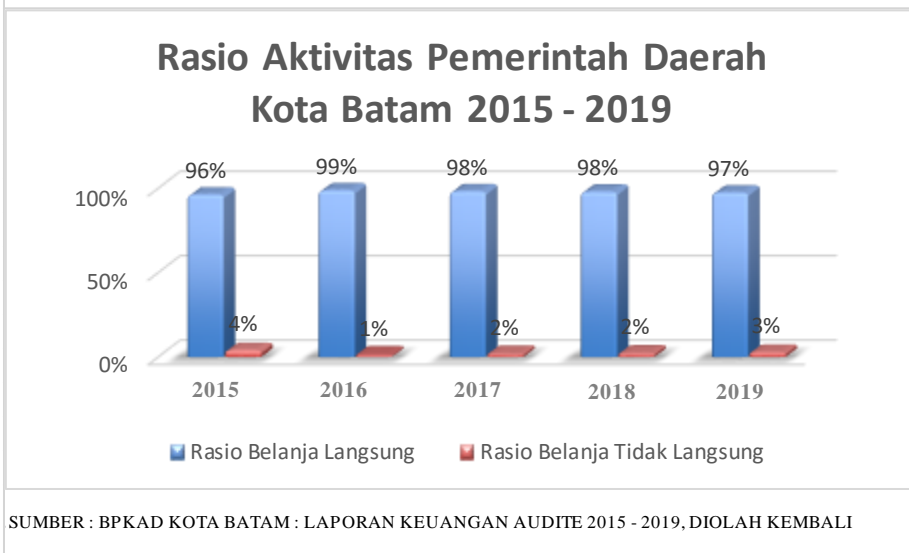
Hasil dari analisa aktivitas adalah untuk menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah membelanjakan dana daerah. Sesuai di kajian pustaka idealnya dana daerah lebih banyak di alokasikan ke belanja langsung karena akan mempengaruhi hasil kegiatan. Hasil analisa aktivitas Pemerintah Kota Batam sudah ideal dalam mengalokasikan dana daerah, karena mayoritas digunakan untuk belanja langsung.

**Tabel 2.5. Analisa Aktivitas Pemda Kota Batam, 2015 - 2019**

| T.A. | Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung |
|------|------------------|------------------------|
| 2015 | 96%              | 4%                     |
| 2016 | 99%              | 1%                     |
| 2017 | 98%              | 2%                     |
| 2018 | 98%              | 2%                     |
| 2019 | 97%              | 3%                     |

SUMBER : BPKAD KOTA BATAM : LAPORAN KEUANGAN AUDITE 2015 - 2019, DIOLAH KEMBALI

**Gambar 3. Grafik Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah Kota Batam 2015 -2019**



### Analisa Pertumbuhan

Hasil analisa pertumbuhan akan memperlihatkan kesanggupan Pemda dalam meningkatkan, ataupun mempertahankan kinerjanya. Dan hasil analisa pertumbuhan APBD Kota Batam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tergambar adanya turun naik kinerja Pemerintahan Daerah dalam 5 tahun (2015 – 2019).

Pertumbuhan PAD walaupun naik turun, tetapi masih menggambarkan hasil yang positif dari tahun 2015 – 2019, tertinggi di tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 11%, dan terendah di tahun 2016 sebesar 5%. Pertumbuhan pendapatan di tahun 2015 hasilnya -4%, mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi 14%, di 2017 kembali mengalami penurunan dengan hasil -3%, di tahun 2018 meningkat menjadi 9%, dan tahun 2019 sebesar 7%. Dan Pertumbuhan belanja hanya di tahun 2016 yang hasilnya negatif yaitu -1%, dan positif untuk tahun – tahun selebih nya. Tertinggi di tahun 2015 yaitu sebesar 9%.

**Tabel 2.6. Analisa Pertumbuhan APBD Kota Batam 2015 - 2019**

| T.A. | Pertumbuhan PAD | Pertumbuhan Pendapatan | Pertumbuhan Belanja |
|------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 2015 | 7%              | -4%                    | 9%                  |
| 2016 | 5%              | 14%                    | -1%                 |
| 2017 | 11%             | -3%                    | 5%                  |
| 2018 | 11%             | 9%                     | 7%                  |
| 2019 | 6%              | 7%                     | 6%                  |

SUMBER : BPKAD KOTA BATAM : LAPORAN KEUANGAN AUDITE 2015 - 2019, DIOLAH KEMBALI

### Analisa Kinerja

Setelah tahapan-tahapan analisa diatas, maka hasilnya dapat dirangkum menjadi laporan analisa kinerja. Hasil rangkuman analisa kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7. Rasio Keuangan Kota Batam Tahun Anggaran 2015 - 2019**

| Tahun Anggaran | Derajat Desentralisasi | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | Rasio Aktivitas  |                        | Rasio Pertumbuhan |                        |                     |
|----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                |                        |                                   | Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | Pertumbuhan PAD   | Pertumbuhan Pendapatan | Pertumbuhan Belanja |
| 2015           | 43%                    | 76%                               | 96%              | 4%                     | 7%                | -4%                    | 9%                  |
| 2016           | 40%                    | 66%                               | 99%              | 1%                     | 5%                | 14%                    | -1%                 |
| 2017           | 45%                    | 82%                               | 98%              | 2%                     | 11%               | -3%                    | 5%                  |
| 2018           | 46%                    | 92%                               | 98%              | 2%                     | 11%               | 9%                     | 7%                  |
| 2019           | 45%                    | 90%                               | 97%              | 3%                     | 6%                | 7%                     | 6%                  |
| Rata-Rata      | 43,92%                 | 81,31%                            | 97,64%           | 2,36%                  |                   |                        |                     |
| Catatan :      | Cukup Baik             | Tinggi, Delekatif                 | Sudah Ideal      |                        |                   |                        |                     |

SUMBER : BPKAD KOTA BATAM : LAPORAN KEUANGAN AUDITE 2015 - 2019, DIOLAH KEMBALI

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil keseluruhan analisa laporan keuangan Pemda Kota Batam, dapat dikatakan bahwa kinerja Pemda Kota Batam sudah baik. Dari hasil analisa desentralisasi sudah menggambarkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata 43,92% dalam 5 tahun (2015 – 2019). Analisa kemandirian keuangan juga menggambarkan hasil yang baik dengan rata-rata sebesar 81,31% dalam 5 tahun (2015 – 2019) yang berarti tingkat kemampuan keuangan sudah tinggi dengan pola hubungan delegatif. Untuk hasil analisa aktivitas juga sudah ideal yaitu rata-rata pengeluaran lebih besar belanja langsung sebesar 97,64%, dan belanja tidak langsung sebesar 2,36%. Hasil dari analisa pertumbuhan walaupun masih belum stabil, akan tetapi tingkat pertumbuhan di tahun 2019 masih positif.

### Saran

Melihat dari hasil keseluruhan analisa keuangan Pemda Kota Batam tahun anggaran 2015 - 2019, saran yang dapat disampaikan adalah sangat diperlukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena untuk hasil analisa kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi sudah baik, namun jika Penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih ditingkatkan, maka dapat meningkatkan juga hasil analisa derajat desentralisasi. Akan lebih baik lagi jika analisa derajat desentralisasi hasilnya diatas 50%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, and Syamsul Kusufi. 2017. *Teori Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irsutami. 2016. “Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam Untuk Tahun 2006 – 2010.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 5(9).
- Justyanita, Sephia Septiana, Benny Septiawan dan Micel Thai. 2021. “Analisis Pendapatan Kota Batam Tahun 2018-2020 Melalui APBD Dan PDRB.” *Jurnal Sosial dan Teknologi* 1(5).
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN2.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Situs resmi BPS Kota Batam, <https://batamkota.bps.go.id/>
- Situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, <https://bpkad.batam.go.id/>